



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDDY GUNAWAN

2. Jabatan : INSPEKTUR

3. NHK : 204152

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.690.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/252 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.180.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 12.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 35.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 54.773.085

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.791.773.085

**III. HUTANG** Rp. 95.000.000

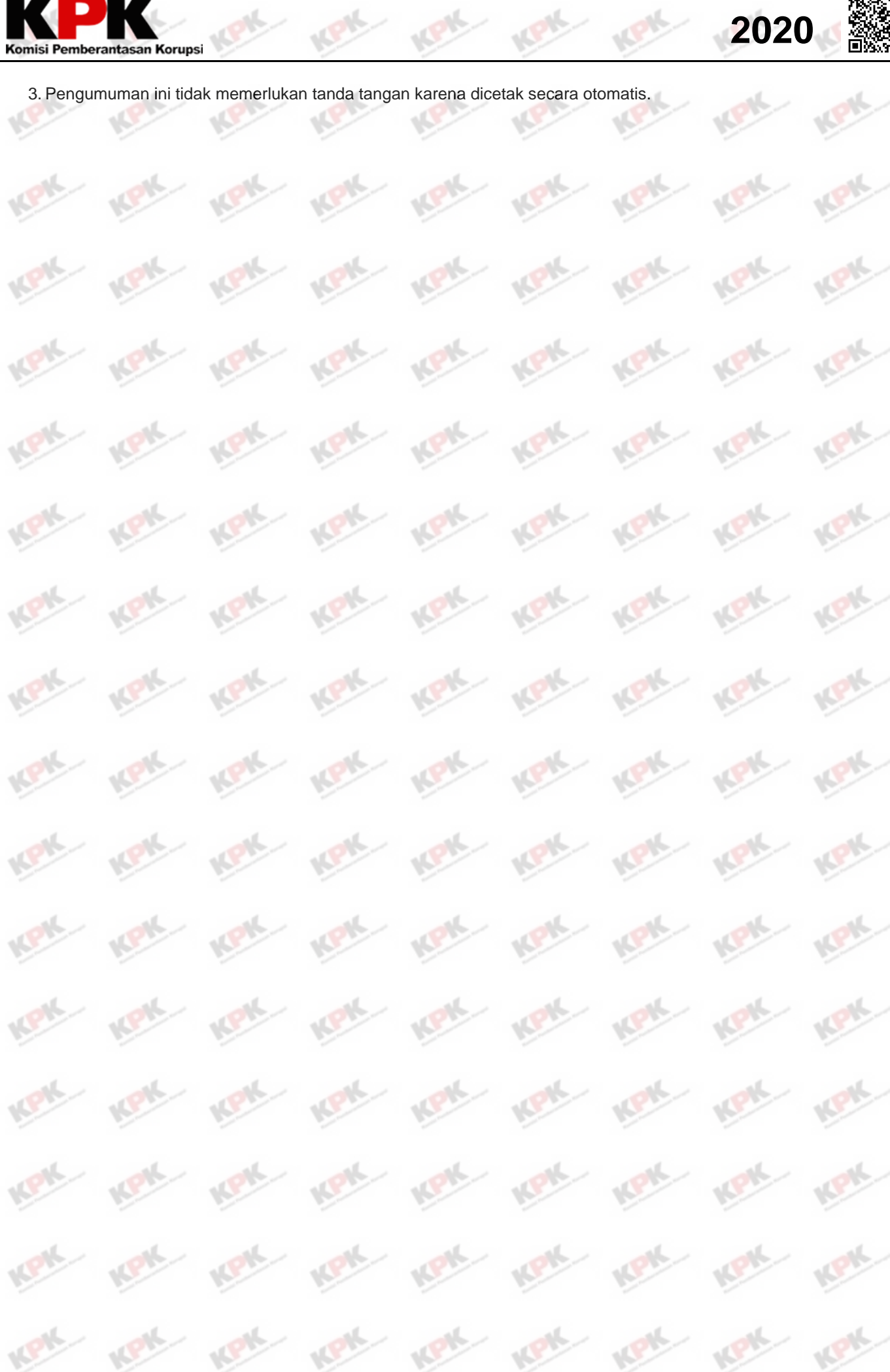
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.696.773.085

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GEDE PASEK SUARDIKA**
2. Jabatan : **INSPEKTUR JENDERAL**
3. NHK : **210317**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **3.418.000.000**

1. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 28.29 m2/28.29 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 123.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 363 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
10. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
11. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
12. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL



SENDIRI Rp. 120.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/21 m2 di KAB / KOTA

BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **378.000.000**

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

378.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **7.500.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.173.097.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **4.976.597.000****III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **4.976.597.000**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARY KRISWANTO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 99959

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 377.000.000

1. MOTOR, HONDA CRF 150CC TRAIL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2007, WARISAN Rp. 120.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS YARIS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 26.300.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.204.918.397

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.808.218.397

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.808.218.397

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Jujun Endah Wahjuningrum
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 192357

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.365.000.000

1. Tanah Seluas 966 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
4. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/26 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 761.000.000
7. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.014.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 37.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 1.156.040.839

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 684.780.593



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.242.821.432
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.242.821.432

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD ANTO JULIANTO

2. Jabatan : INSPEKTUR

3. NHK : 56619

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 241.452.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 86.424.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m<sup>2</sup>/77 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.028.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 3.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 744.804.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 250.000.000

**Sub Total** Rp. 1.240.756.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.240.756.000

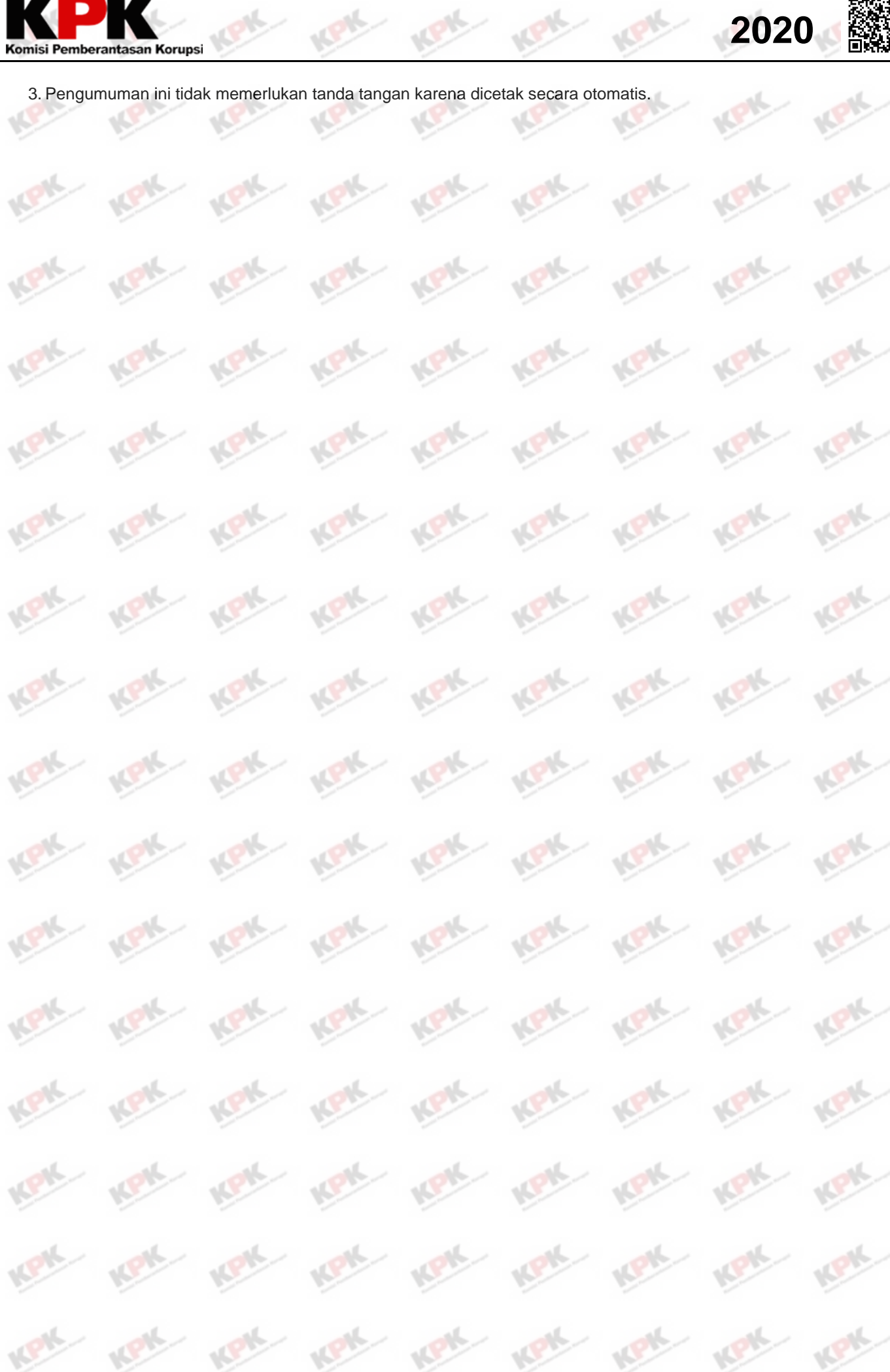
**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SRI LESTARI RAHAYU**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **423012**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.300.000.000**

1. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/66 m2 di KAB / KOTA  
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **160.000.000**

1. MOBIL, HONDA HR-V MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
160.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **135.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **959.293.060**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**

**Sub Total** Rp. **2.554.293.060**

**III. HUTANG** Rp. **---**

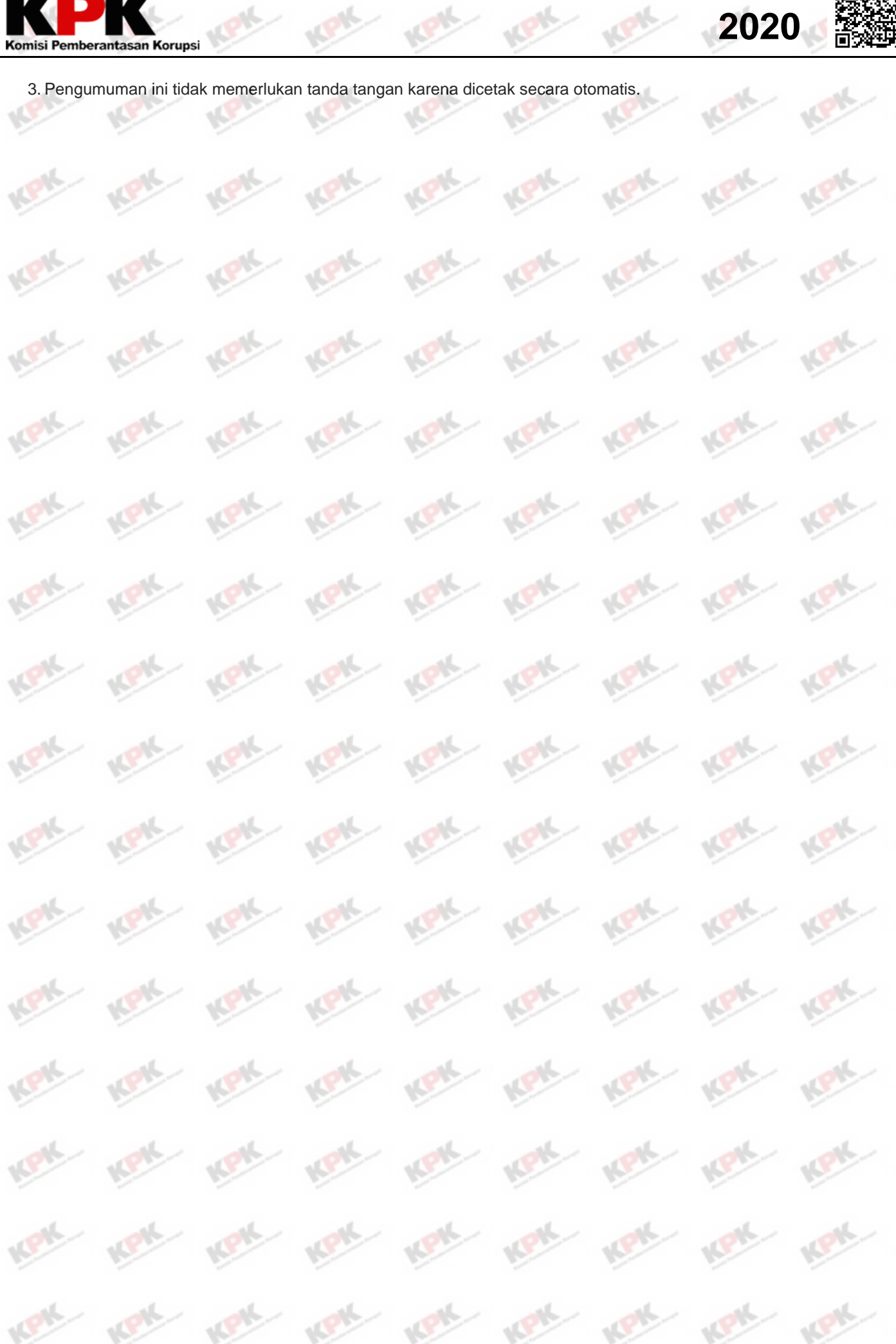
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.554.293.060**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WEKU FREDERIK KARUNTU**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **273024**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/88 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah Seluas 2400 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/54 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 600.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS / PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ CITY CAR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 928.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 393.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 4.341.500.000**III. HUTANG** Rp. 606.100.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.735.400.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.